



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Nomor : 3

TAHUN 1985

SERI : D

No. 3

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A N G K A T**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 4 TAHUN 1984
TENTANG :**

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah yang akan berlangsung terus menerus sebagai bahagiandari pada pembangunan Nasional dirasa perlu menetapkan suatu Pola Dasar sebagai pedoman yang memberi arah kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II Langkat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.
 2. Bahwa hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini menunjukkan perobahan dan kemajuan di Daerah Tingkat II Langkat untuk itu dipandang perlu menetapkan pola Dasar pembangunan Daerah Tingkat II Langkat dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.II/MPR/1983 tentang Garis Besar Dalam Negera.
 2. Undang-undang No, 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Undang-undang No, 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Utara.
 4. Surat Menteri Dalam Negeri No. Bangda 1/9/26 tanggal 20 Nopember 1978 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah.
 5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Nopember 1983 No. 050/2104/ Bangda perihal Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1984 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 16 Tahun 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat No.8/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II LANGKAT disusun sebagai berikut :

- a. B A B. I : P E N D A H U L U A N.
- b. B A B II : POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TING-
KAT II JANGKA PANJANG.
- c. B A B III : POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KE
EMPAT DAERAH TINGKAT II LANGKAT.
- d. B A B IV : P E N U T U P.

Pasal 2

Isi berserta uraian perincian sebagai tersebut dalam pasal 1
Peraturan Daerah ini, terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pem-
bangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat yang
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 3.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundang-
kan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya da-
lam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

B i n j a i, 23 Juni 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
ERAH KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT L A N G K A T

dto,

dto,

(HASBI SAIDI, BA.)

(H. R. MOELYADI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat
seri : D. No 3 Tahun 1985.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Sumatera Utara
dengan Surat Keputusan Nomor 188.
342-28/KP/Tahun 1985 tanggal 14
Maret 1985.

1985
8-485
Sekretaris Wilayah Daerah
(Drs. H. Hakimil Nasution)
NIP. 10055563.-

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LANGKAT

B A B 1

P E N D A H U L U A N

A. PENGERTIAN

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat adalah Garis-garis Kebijaksanaan Pembangunan Daerah yang pada hakekatnya adalah Pola Umum Pembangunan Daerah, sebagai pencerminan kehendak Rakyat di Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat ini merupakan suatu rangkaian program Pembangunan Daerah yang menyeluruh terarah dan terpadu, serta akan berlangsung terus menerus sebagai bagian dari Pembangunan Nasional.
3. Rangkaian program Pembangunan yang terus menerus di Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat dimaksudkan untuk menunjang pencapaian tujuan Pembangunan Nasional seperti termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang mewujudkan satu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

B. KEDUDUKAN.

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat adalah merupakan penjabaran dari pola Dasar pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Perda) No. 16 Tahun 1983) yang disesuaikan dengan aspirasi dan kondisi-kondisi masyarakat Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat.
2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat merupakan pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara di Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

C. F U N G S I

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat berfungsi.
 - a. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan di Daerah Tingkat II Langkat Kabupaten Langkat.
 - b. Sebagai dasar dalam penyusunan Repelita rencana Pembangunan wilayah dan penyusunan rencana Kota.

D. SIFAT/KARAKTERISTIK

Pola dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat ini sifatnya adalah memberikan arah terhadap Pembangunan daerah yang sedang dilakukan, dengan tujuan agar dapat diwujudkan keadaan yang di inginkan dalam waktu lima tahun berikutnya sehingga dalam jangka panjang secara terhadap terwujud cita-cita rakyat di Daerah Tingkat II Langkat pada khususnya dan Indonesia pada umumnya seperti termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.

E. RUANG LINGKUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat ini dimaksud merupakan Pola Dasar Pembangunan semua aspek Pembangunan yang dilakukan di Dati II Langkat.

F. S U S U N A N

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan diinginkan baik dalam waktu lima tahun berikutnya maupun dalam jangka panjang maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Langkat disusun dan dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan Daerah dengan susunan dan urutan sebagai berikut :

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Langkat Jangka Panjang. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun ke empat Daerah Tingkat II Langkat.

B A B II

POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II LANGKAT JANGKA PANJANG.

A. PENDAHULUAN

1. Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang garis - besar Besar dan arah Pembangunan Daerah untuk Jangka waktu 25-30 tahun sebagai pengarahan di dalam melaksanakan Pembangunan di daerah Tingkat II Langkat.
2. Pola Umum Pembangunan Daerah disusun berdasarkan landasan idi Pancasila landasan konstitusional Undang - undang Dasar 1945 dan landasan operasional Perda No.16 tahun 1983 Daerah Tingkat I Sumtera Utara, dan TAP. MPR No.II/MPR/1983 Tahun 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
3. Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat dalam rangka perekonomian Nasional adalah sebagai Daerah Agraria.

Kegiatan ekonomi terpenting di Daerah ini adalah perkebunan Besar Perkebunan rakyat hertikultura, dan tanaman Pangan. Disamping Daerah Agraris, Langkat juga terkenal sebagai Daerah Pertambangan.

B. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

1. Kondisi.

- a. Daerah Langkat dapat dibedakan atas dataran tinggi yang merupakan pegunungan (Bukit Barisan) disebelah barat, dan merupakan dataran rendah disebelah Timur yang berbatasan dengan Selat Sumatera. Luas Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat 6.319.55 Km² terdiri dari 15 Kecamatan 9 Kelurahan dan 210 Desa. Penduduk Daerah Tingkat II Langkat sebahagian besar tinggal dipedesaan. Kepadatan penduduk antar kecamatan tidak sama, berkisar di antara 31 Jiwa/Km² di Kecamatan Bahorok dan 593 Jiwa/Km² di Kecamatan Binjai. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk di Daerah Tingkat II Langkat = 112 Jiwa/Km².
- b. Struktur ekonomi Daerah Tingkat II Langkat masih berat sebelah yaitu pada Sektor pertanian, sedangkan sektor industri peranannya masih relatif kecil.
- c. Walaupun terdapat perkembangan yang cukup pesat dalam penambahan prasarana ekonomi selama Pelita III dan Pelita sebelumnya, namun masih terdapat kekurangan prasarana untuk wilayah tertentu terutama prasarana perhubungan di desa-desa Pantai dan desa-desa pedalaman Demikian juga halnya penambahan bangunan pengairan irigasi tehnik dirasakan masih lambat, sehingga usaha penambahan areal pesawahan lambat pula. Produksi beras pada Pelita III belum mampu memenuhi kebutuhan Daerah Tingkat II Langkat.

2. Potensi.

- a. Jumlah penduduk menurut sensus pada tahun 1977 sejumlah 519.459 jiwa dan cacah jiwa dilaksanakan pada tahun 1977 sebanyak 621.632 jiwa dan sensus pada tahun 1982 sebanyak 706.910 jiwa. Bila dilihat jumlah penduduk pada tahun 1971 dan Registrasi penduduk tersebut rata-rata 3, 14% tiap bulan.
- b. Daerah Tingkat II Langkat adalah hinterland dari Kodya Binjai. Ditinjau dari sudut ini dan posisi yang merupakan hinterland Kota Binjai dan jalan lintas dari Medan ke Daerah Istimewa Aceh sangat menguntungkan dalam pembangunan sektor-sektor ekonomi/perdagangan.
- c. Kegiatan ekonomi terpenting di daerah ini adalah pertanian yang menghasilkan komoditi eksport dan bahan pangan yang

terdiri dari hasil perkebunan besar, perkebunan Rakyat perikanan dan kehutanan. Perkebunan besar ini terutama diusahakan oleh PT. Perkebunan Negara, PN. Perkebunan Negara dan Perkebunan-perkebunan swasta Nasional/Asing. Produksi perkebunan yang dihasilkan dari Dati II Langkat terutama Kelapa Sawit, Karet, Kelapa dan Tembakau dan Coklat. Pada Pelita IV ini direncanakan penanaman tebu dengan sistem Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) untuk mensuplay Pabrik gula di Kecamatan Binjai.

- d. Produksi tanaman pangan terutama beras, terdapat pada seluruh Kecamatan, jagung di Kecamatan Selesai, Kecamatan Sei. Binjai dan Kecamatan Binjai. Produksi perhektar dapat dikatakan belum begitu tinggi karena sistem pertanian yang belum begitu intensif ditambah dengan kesuburan tanah yang sudah menurun. Sawah-sawah di Daerah Tingkat II Langkat sebagian besar merupakan tadah hujan dengan irigasi yang belum sempurna.
- e. Berbagai jenis buah-buahan banyak terdapat di Daerah Tingkat II Langkat seperti Rambutan, Durian, Cempedak, dan Durian banyak terdapat di Langkat Hulu demikian juga semangka, pepaya, pisang banyak terdapat di Daerah ini. Buah-buahan ini sebagian besar dapat mensuplay Kota Binjai dan Medan serta sebagian ke Daerah Istimewa Aceh.
- f. Sayur-sayuran dari Daerah ini seperti kacang panjang, terong daun ubi, bayam dan lain-lain banyak terdapat di Daerah ini Hasil sayur-sayuran tersebut digunakan/dijual untuk menutupi kebutuhan Kota Binjai & Medan yang merupakan pula mata pencarian sampingan penduduk di Daerah ini.
- g. Potensi ekonomi lainnya di daerah ini adalah perikanan, pertambangan, industri rumah tangga. Perikanan terutama banyak dihasilkan ikan laut dari pangkalan Brandan, Pangkalan Susu, Tanjung Pura dan Kecamatan Gebang, Secanggang seperti Udang dan berbagai jenis ikan laut.
- h. Potensi pertambahan, terutama di Daerah Kecamatan Pangkalan Susu dan Kecamatan Babalan seperti pertambahan minyak mentah. Potensi Tambang Semen terdapat di Bahorok, dan sampai sekarang masih belum dieksploitasi.
- i. Potensi Pariwisata berada di Kecamatan Sei. Binjai Timbang Lawan dan Rehabilitasi Mawas di Kecamatan Bahorok dapat dikembangkan.
- j. Industri Rumah Tangga (Home Industri) banyak terdapat di Daerah ini seperti pembuatan dodol dan Kecamatan Tanjung Pura, anyampayaman di Kecamatan Tanjung Pura, Hinai, Gebang dan Kecamatan Binjai.

- k. Areal kehutanan di Daerah ini sekitar 52% dan banyak menghasilkan berbagai bahan-bahan kayu seperti kayu meranti, damar laut, dan berbagai jenis hutan lainnya.
- l. Berbagai Sungai seperti Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan dan Sungai Besitang terdapat di Daerah ini. Sungai-sungai ini disamping sebagai jalur lalu lintas air juga digunakan untuk pengairan ditambah lagi sumber galian.
- m. Modal rohaniyah dan mental penduduk di Daerah ini yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta terdapat kerukunan antara umat beragama, merupakan tenaga penggerak bagi keberhasilan pembangunan disertai kepercayaan, keyakinan atas kebenaran Falsafah Pancasila. Masih banyak lagi modal Dasar lainnya yang dimiliki di Daerah ini baik modal Dasar berupa potensi ekonomi maupun potensi sosial lainnya yang dapat dikembangkan

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Jangka Panjang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, serasi dan seimbang, mampu mengurus rumah tangga sendiri sebagai pelaksanaan Otonom Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, menjamin perkembangan pembangunan daerah, dan memperlancar pelaksanaan pembangunan Nasional yang tersebar di seluruh pelosok Daerah Tingkat II Langkat.

D. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

1. Pembangunan Daerah dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
2. Pembangunan Daerah Jangka Panjang dilaksanakan secara bertahap. Adapun tujuan setiap pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.
3. Sasaran utama pembangunan Daerah Jangka Panjang ialah terciptanya landasan yang kuat bagi daerah Langkat khususnya dan Indonesia umumnya untuk tumbuh dan berkembang atas dasar kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
4. Titik berat pembangunan Daerah Jangka Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama keseimbangan antara bidang ekonomi dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Hal ini bahwa sebagian besar usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang politik, sosial budaya dan pertahanan

keamanan, dilaksanakan sepadan dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi.

5. Pembangunan Daerah harus bersama-sama dengan pembinaan dan pemeliharaan stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis baik di bidang politik keamanan maupun di bidang ekonomi.
6. Pembangunan Daerah disamping meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang semakin meningkat bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan.
7. Kebijakan pembangunan Daerah adalah memanfaatkan segenap kemampuan modal dan potensi daerah serta modal luar secara berdaya guna untuk membina, membimbing pertumbuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah untuk lebih berparti separti dalam proses pembangunan antara lain melalui kegiatan koperasi.
8. Pembangunan Daerah Jangka Panjang, disamping meningkatkan produksi daerah harus juga mempercepat pertumbuhan lapangan kerja dengan mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kecakapan dan keterampilan sesuai dengan ketubuhan pembangunan.
9. Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan cepat, pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui program kependudukan dan Keluarga Berencana mutlak harus dan dilaksanakan dengan berhasil.
10. Pembangunan Daerah Jangka Panjang membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi daerah sehingga sektor diluar pertanian semakin besar dan sektor industri menjadi tulang punggung ekonomi.
11. penggalian sumber kekayaan alam diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup dan kebijaksanaan penghematan yang menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang.
12. Pembangunan Daerah Jangka Panjang, dititik beratkan kepada bidang ekonomi terutama melalui pembangunan sektor pertanian, industri dan pariwisata sedang bidang-bidang lainnya akan ditingkatkan sepadan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi.
13. Arah pembangunan untuk masing-masing bidang adalah sebagai berikut :
 - a. Bidang Ekonomi :
 1. Tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara kemampuan dan kekuatan Industri maka, dukungan kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh maka sektor

industri harus lebih digalakkan.

Struktur ekonomi yang seimbang itu akan dapat dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan serangkaian Repelita dan untuk Repelita keempat. Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan industri akan terus dikembangkan dalam Repelita-repelita selanjutnya.

2. Usaha-usaha perkebunan akan terus ditingkatkan baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat. Perkebunan besar akan meningkatkan usaha diversifikasi tanaman dan jenis produksinya, pengembangan perkebunan rakyat akan dilanjutkan dengan mengembangkan UPP dan PIR BUN.
 3. Peningkatan produksi pangan akan terus dilaksanakan untuk mencapai swasembada pangan.
 4. Prasarana dan sarana perhubungan sebagai urat nadi perekonomian harus berkembang sejalan dengan pertumbuhan perekonomian serta mendorong pertumbuhan daerah terbelakang dalam usaha untuk pemerataan pembangunan.
- b. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya.

Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhannya Maha Esa, maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dan seimbang lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis, dan semangat gotong royong yang berkembang, sehingga sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasional yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan pribadi manusia Indonesia harus menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila.

c. Bidang Sosial Politik.

Pembangunan Daerah mendukung usaha pemantapan-pemantapan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi setiap warga negara sehingga dapat terjaminnya kelancaran usaha mencapai tujuan nasional. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, termasuk didalam usaha mewujudkan pemerintah yang bersih berkemampuan dan berwibawa, pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semakin berdaya guna serta terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin mantap.

d. Bidang pertahanan dan Keamanan.

Mendukung dan ikut memantapkan sistim pertahanan keamanan rakyat semesta yang mampu mensukseskan mengamankan perjuangan dan pembangunan Nasional dari setiap ancaman yang datang dari dalam ataupun dari luar negeri, sehingga usaha daerah mencapai tujuan Nasional benar-benar arah dan tertib.

14. Perwilayahan.

Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dikelompokkan 3 (tiga) sub wilayah pembangunan, dimana untuk setiap sub. wilayah pembangunan itu merupakan satu kesatuan yang ditinjau dengan kaitannya dari sudut ekonomi, sosial budaya dan administrasi pemeritahan. Untuk ketiga sub wilayah pembangunan terhadap satu pusat pembangunan terhadap daerah belakangnya sehingga antar pusat pembangunan, daerah belakangnya saling mengisi dan menunjang yang mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat terdiri dari 15 Kecamatan yang masing-masing Kecamatan dengan ibu kotanya adalah. Kecamatan Bohorok, Salapian di Tanjung Langkat Padang Tualang di Tanjung Selamat, Kecamatan Kuala di Kuala, Sei Bingei di Namu ukur, Besitang di Besitang, Kecamatan Balalan di Pangkalan Berandan, Pangkalan Susu di Pangkalan Susu, Gebang di Gebang, Hinai di Hinai di Tanjung teringin, Stabat di Stabat, Selesai di Pekan Selesai dan Kecamatan Binjai di Kuala Begumit.

- a. Sub Wilayah Pembangunan I dengan pusat pembangunan di Kuala (Kecamatan Kuala), wilayah meliputi Kecamatan Bohorok, Sei Binjai Salapian, Kuala dan Kecamatan Binjai, Potensi utamanya adalah perkebunan, pertanian rakyat, peternakan, pertambangan, hasil hutan dan pariwisata. Ditinjau dari potensi ini maka hasil-hasil pertanian masih belum diusahakan secara maksimal, dan pariwisata di Bukit Lawang/Rehabilitas Mawas belum berkembang. Untuk itu masih perlu dilaksanakan perbaikan pengairan/irigasi-irigasi, perbaikan-perbaikan/rehabilitasi perkebunan rakyat. Dalam rangka penggalakan pariwisata perlu diadakan survey lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk proyek pariwisata seperti ke Kecamatan Bahorok, dan perbaikan sarana maupun prasarana pariwisata untuk menunjang objek pariwisata tersebut.
- b. Sub. Wilayah Pembangunan II pusat pengembangannya di Tanjung Pura yang wilayahnya meliputi Kecamatan Stabat, Kecamatan Secanggang, Kecamatan Hinai, Kecamatan Padang Tualang dan Kecamatan Tanjung Pura. Potensi utamanya adalah pertanian rakyat, perkebunan, perindustrian perikanan serta peternakan. Untuk memanfaatkan potensi ekonomi ini terutama dari bahaya banjir, seperti pengadaan penghijauan dan reboisasi di hulu sungai, dan pengerukan sungai di bagian hilir.
- c. Sub. Wilayah Pembangunan III, pusat pembangunannya di Pangkalan Susu dengan wilayahnya meliputi Kecamatan Ge-

bang, Kecamatan Babalan, Kecamatan Besitang, Kecamatan Pangkalan Susu. Potensi utamanya adalah petanian rakyat, pertambangan, perikanan dan perkebunan. Dalam rangka pemanfaatan potensi pertambangan, perlu diperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Sedangkan para nelayan ikan akan ditingkatkan pembinaannya maupun pelayanan kredit lunak. Pengembangan koperasi akan terus ditingkatkan untuk mendukung usaha-usaha nelayan dalam rangka pembinaannya. Adanya pembagian sub wilayah pembangunan yang demikian rupa adalah secara optimal, terutama dilihat dari keadaan alam, iklim topografi dan keadaan sosial budaya, sehingga akan memberikan dampak positif bagi peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Dilihat dari sudut penatapan administrasi pemerintah secara struktural, Lembaga Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat belum terealisasi, tetapi pada Pelita IV direncanakan akan terealisasi dan kedudukan lembaga tersebut mempunyai wewenang yang sama dengan sub wilayah Pembangunan tersebut diatas.

E. CATATAN DASAR

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Tingkat II Langkat merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Jangka Menengah yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat yang penyusunannya berupa Repelita Daerah Tingkat II Langkat.

B A B - III

POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEEMPAT DAERAH TINGKAT II LANGKAT

A. PENDAHULUAN.

1. Pembangunan lima tahun keempat Daerah Langkat adalah kelanjutan dari pembangunan lima tahun ketiga. Karena itu berbagai kegiatan Pembangunan selama Pelita III akan terus dikembangkan dan ditingkatkan, terutama dalam hal peningkatan taraf hidup yang lebih merata di Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat.
2. Melihat hasil pembangunan yang dicapai dalam Pelita III serta belajar dari pengalaman-pengalaman berharga selama tiga Pelita maka Daerah Langkat bertekad untuk mempercepat tercapainya sasaran Pembangunan Jangka Panjang sebagaimana ditetapkan dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang.
3. Pelita ke IV Daerah Langkat ikut mendukung terciptanya kerangka landasan bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan ber-

kembang terus dalam rangka mencapai tinggal landas dalam Pelita keenam.

4. Sebagaimana lanjutan dari pada Pelita III, masalah-masalah pokok yang perlu diselesaikan akan ditingkatkan penanggulangannya.

Masalah-masalah pokok itu ialah :

- a. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menyebabkan pertambahan angkatan kerja cukup besar dengan pendidikan/keterampilan yang belum memadai dengan gerak pembangunannya.
- b. Penyebaran penduduk tidak merata.
- c. Sektor industri dan sektor lain diluar pertanian belum mampu menyerap angkatan kerja yang cukup besar, disebabkan antara lain oleh kualitas tenaga kerja dan struktur ekonomi yang berat sebelah pada sektor pertanian.
- d. Tingkat penyebaran teknologi yang masih rendah dan sistem produksi sektor modern serta tradisional yang belum saling menunjang mengakibatkan sektor pertanian dan sektor industri belum mampu memproduksi secara optimal.
- e. Pemanfaatan sumber daya alam kurang memperhatikan segi ples tarian sebagai akibat sempitnya lapangan kerja rendahnya pendapatan.
- f. Kurangnya penertiban pemukiman di Daerah Aliran Sungai (DAS) Daerah Hulu Sungai (DHS) dan diatas kemiringan 40% mempercepat rusaknya sumber daya alam dan lingkungan.
- g. Produksi pangan yang telah dicapai selama ini belum mampu mencapai swasembada pangan antara lain disebabkan konsumsi beras perkapita yang tinggi, jumlah penduduk yang besar, dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan kurangnya sarana dan prasarana produksi.

5. Dalam Pelita ke IV Daerah dilanjutkan kebijaksanaan pembangunan yang berlandaskan pada triologi pembangunan ialah Pemerataan, Pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.

D. T U J U A N.

- Pertama : Meningkatkan produksi pangan dalam rangka menuju swasembada pangan Daerah Tingkat II Langkat.
- Kedua : Menggali dan meningkatkan peranan daerah dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari komodity ekspor sebagai penghasil devisa Negara.

- Ketiga : Meningkatkan peranan industri dalam usaha peningkatan pendapatan penduduk yang menunjang pembangunan Daerah serta menggali sektor pariwisata.
- Keempat : Meningkatkan kecerdasan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya serta pembinaan agama kebudayaan dan generasi muda.
- Kelima : Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikut.

C. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Peningkatan pembangunan selama Pelita IV terutama diarahkan kepada peningkatan produksi dan perluasan kesempatan kerja disegala bidang khususnya sektor pertanian, industri dan pariwisata. Peningkatan produksi pertanian akan dititik beratkan kepada produksi tanaman pangan yang dikaitkan kepada usaha pemenuhan kebutuhan pangan dan produksi perkebunan.
2. Meningkatkan pertanian pangan dengan peningkatan mutu areal lahan, sehingga berswasembada pangan, peningkatan pertanian peternakan dan perikanan, sehingga dapat mencapai norma gizi Nasional dan menambah devisa.
3. Posisi Daerah Langkat sebagai penghasil devisa terbesar di luar minyak bumi yang sebagian besar bersumber dari hasil perkebunan, akan tetap dipertahankan bahkan terus ditingkatkan. Oleh karena itu, usaha diversifikasi yang sudah dilaksanakan akan diteruskan. Perkebunan rakyat akan dikembangkan dengan bentuk usaha yang bersifat komorsil antara lain dengan sistim Unit Pelaksana Proyek (UPP) dan Perkebunan inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN). Keberhasilan pembangunan sub Sektor perkebunan akan mendorong pertumbuhan industri yang mengelola hasil perkebunan dari bahan mentah menjadi bahan baku, barang setelah jadi.
4. Pembangunan sektor industri diarahkan kepada agro industri, yang meliputi industri besar, menengah, kecil dan tradisional diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi dalam rangka mewujudkan keseimbangan struktur ekonomi Daerah, yang didukung oleh pertanian yang tangguh; Pertumbuhan sektor agro industri dan keseimbangan struktur ekonomi Daerah akan meningkatkan pengembangan sektor perdagangan dan sektor pertanian.
5. Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan lebih ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, sebagai sumber pendapatan masyarakat dan penerimaan devisa.

Pembinaan serta pengembangan pariwisata tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kelestarian lingkungan hidup. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata akan mendorong tumbuhnya industri jasa dan industri kerajinan.

6. Jumlah penduduk yang cukup besar diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Untuk itu akan ditingkatkan usaha pembinaan dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan jalan antara lain : Meningkatkan produksi pangan dan mutu gizi, memperluas fasilitas dan memperbaiki mutu pendidikan dan latihan kerja dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta yang mampu meningkatkan perluasan lapangan kerja.
7. Untuk perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja diperlukan pendidikan ketrampilan pendidikan, yang dapat menciptakan lapangan kerja, peningkatan pembangunan berbagai sektor, penentuan skala prioritas investasi, pemilihan teknologi tepat guna serta pengembangan proyek padat karya di pedesaan.
8. Sektor penunjang seperti komunikasi yang lancar dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan aspek kehidupan lainnya.
9. Untuk makin meratakan hasil pembangunan dalam pelita keempat maka ditingkatkan program yang dapat menambah pendapatan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Demikian pula akan dilanjutkan program yang memberi kesempatan lebih banyak kepada pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya.
10. Pembinaan dunia usaha diarahkan agar mampu memegang peranan dalam perekonomian yang sehat sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam hubungan ini perlu diciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong terciptanya kondisi yang saling menunjang antara usaha Negara, Koperasi dan Swasta.
11. Dalam pembinaan perkoperasian diutamakan untuk lebih memantapkan kemampuan Badan Pembinaan dan penyuluhan Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Primer, dan koperasi fungsional lainnya, sehingga peranan Koperasi dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan makin besar.
12. Pemanfaatan tanah dan peningkatan produktivitas tanah dalam pembangunan diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial maka disamping menjaga kelestariannya perlu dilaksanakan penataan tentang penggunaan, pengusahaan dan pemilikan tanah.
13. Masalah lingkungan hidup dan kelestarian alam akan mendapat perhatian dalam melaksanakan setiap program pembangunan

- agar ekosistem jangan sampai rusak, atau mengalami kemunduran, melalui pemantapan dan rehabilitasi sumber daya alam.
14. Untuk mengedalikan pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahteraan maka program kependudukan dan keluarga Berencana akan diperluas dan diintensifkan.
 15. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan, pembinaan dan penyempurnaan aparatur pemerintah yang terampil, bersih berdisiplin, dan berdedikasi akan ditingkatkan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih meningkat.
 16. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan, maka pembinaan mental masyarakat akan lebih ditingkatkan sehingga masyarakat lebih memiliki rasa kesadaran, disiplin dan mampu menerima pembaharuan serta berbagai gairah keikutsertaan dalam pembangunan.
 17. Pembinaan moral dan akhlak peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan sebahagian yang penting dan tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Pemantapan kehidupan ummat beragama akan terus ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga terbina suatu kehidupan yang rukun diantara sesama umat beragama. Kerukunan ini akan memperkokoh kesatuan dan persatuan masyarakat dalam meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun daerah ini.
 18. Nilai-nilai sosial budaya yang luhur dan hidup, serta berakar di dalam masyarakat akan dikembangkan untuk mendukung usaha pencapaian keberhasilan pembangunan.
 19. Penantian perkotaan akan ditingkatkan seperti Kota Stabat dan lain-lain, dalam rangka perbaikan pemukiman yang layak agar lebih berfungsi sebagai penunjang pengembangan daerah belakang.
 20. Pembangunan Daerah harus menunjang ketahanan Nasional dan Pertahanan keamanan yang akan mendukung kelancaran dan stabilitas pembangunan. Dalam rangka itu pembinaan ketentraman dan keterfiban akan ditingkatkan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

D. PERIORITAS PEMBANGUNAN

Dalam Pelita IV perioritas pembangunan diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat kepada :

1. Pembangunan sektor pertanian dan agraria yang antara lain :
 - a. Pertanian pangan akan terus ditingkatkan dalam usaha menuju swasembada pangan.

- b. Perkebunan akan terus ditingkatkan baik perkebunan besar dan terutama perkebunan rakyat.
 - c. Pemberian dan penelitian atas hak-hak serta pemanfaatan atas tanah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengabaikan azas-azas pembangunan Daerah.
Kebijaksanaan pembangunan pertanian pangan ditujukan dalam rangka swasembada pangan khususnya Daerah Tingkat II Langkat, sedangkan dalam sektor perkebunan adalah sesuai dengan keadaan tanah yang dimiliki, cocok untuk tanaman perkebunan yang memungkinkan dalam rangka meningkatkan kebutuhan devisa diluar minyak. Produksi perikanan dan peternakan akan terus ditingkatkan dalam rangka mempertinggi nilai gizi yang berasal dari gizi hewani.
- 2. Pengembangan sektor industri terutama ditingkatkan prasarannya dalam bidang industri rumah tangga dan industri lainnya sehingga memungkinkan untuk menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Daerah Tingkat II Langkat.
 - 3. Menggali potensi sektor pariwisata dan sekali gus mengembangkan baik untuk kebutuhan pariwisata lokal maupun asing.
 - 4. Prioritas pembangunan bidang ekonomi ini akan diikuti oleh peningkatan pembangunan dalam bidang politik, sosial budaya pendidikan, kesehatan dan agama, serta bidang lainnya selaras dengan kemajuan yang dicapai dalam pembangunan bidang ekonomi.

E. SASARAN PEMBANGUNAN SETIAP SEKTOR SELAMA PELITA IV.

E K O N O M I.

1. A G R A R I A.

- a). Pemantapan penggunaan tanah di Daerah Tingkat II Langkat pada saat sekarang ini dirasakan belum dilaksanakan secara konsepsional.
- b). Dalam rangka pemantapan penggunaan tanah ini perlu diadakan survey secara mendalam, dalam rangka penentuan tata guna tanah dan mensurvey penduduk yang bermukim disekitar DAS dan yang berada sekitar kemiringan 40% keatas untuk direstelement.
- c). Berbagai kasus-kasus tanah banyak terdapat di Daerah ini yang secara bertahap akan dilaksanakan penyelesaiannya.
- d). Tanah-tanah pertanian perlu diseherakan penyelesaiannya dalam rangka tercapainya program pemerintah yaitu swasembada pangan.

2. PERTANIAN.

a). Pertanian Rakyat.

1. Peningkatan produksi pangan seperti pada beras, palawija, hortikultur, perkebunan, perternakan dan perikanan ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam rangka mencapai swasembada pangan, yang sekali gus meningkatkan dan memperbaiki gizi makanan rakyat. Selain dari itu usahakan untuk menunjang dan mendorong berdirinya usaha-usaha industri seperti buah - buahan maupun perikanan.
2. Pengadaan beras dilaksanakan dengan peningkatan produksi melalui pelaksanaan intensifikasi, ekstensifikasi dan dipersififikasi, dengan prinsip lima tepat.
3. Usaha-usaha peningkatan produksi palawija dan hortikultura dilaksanakan dengan penyajian varitas, perbaikan kultur terkhnis, peningkatan penyediaan saprodi dan perluasan areal penanaman.
4. Dalam rangka usaha-usaha tersebut diatas sekali gus dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan petani, dan perluasan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.
5. Dalam rangka peningkatan produksi beras, usaha-usaha yang perlu dilaksanakan :
 - a. Usaha rehabilitasi dan perbaikan tata pengairan yang telah ada sehingga lebih efisien.
 - b. Pembukaan irigasi-irigasi baru bagi sumber pengairan sawah tadah hujan untuk dapat dijadikan sawah irigasi tekhnis, dan sekali gus pencetakan sawah-sawah.
 - c. Dalam rangka perbaikan irigasi dan pembukaan baru ini sekali gus disertai peningkatan bimbingan dan penyuluhan bagi petani-petani tersebut.
 - d. Tanah-tanah pertanian perlu disegerakan penyelesaiannya dalam rangka tercapainya program Pemerintah yaitu swasembada pangan.

b). Perkebunan Rakyat.

1. Usaha-usaha peningkatan produksi perkebunan rakyat baik kualitas maupun kuantitasnya terus dilaksanakan mulai rehabilitasi kebun-kebun rakyat.
- 2.. Dalam rangka pengembangan perkebunan rakyat dilaksanakan terus Small Holder dengan sistem PIR, sehingga disamping usaha-usaha hasil perkebunan dapat dinikmati penduduk sekali gus teknik-teknik usaha perkebunan modern diserap oleh petani perkebunan rakyat.

3. Dalam kaitan diatas perlu ditingkatkan bantuan bimbingan dari PTP/PN. Perkebunan dengan memberikan kerja sama dibidang teknis, organisasi, permodalan dan pemasaran usaha-usaha tersebut diatas sangat penting terutama bagi petani perkebunan rakyat yang ditujukan peningkatan produksi, peningkatan sumber devisa, perluasan kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani.

c). Perkebunan Besar.

1. Usaha-usaha perkebunan besar PPT/PPN banyak terdapat di daerah ini dimana kemajuan yang dicapai perlu dilanjutkan.
2. Usaha perkebunan swasta perlu dilanjutkan pembinaan pengembangan secara bertahap.

d). Kehutanan.

1. Pemanfaatan hutan di Tingkat II Langkat, harus selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dan alam, karena bahaya banjir akan mengancam di Daerah aliran sungai.
2. Dalam rangka mempertahankan rehabilitasi hutan di daerah ini perlu dilaksanakan rehabilitasi tanah-tanah kritis, dan perlu peningkatan kesadaran rakyat akan arti dari reboisasi dan penghijauan.

e). Perikanan.

1. Pengembangan perikanan di Daerah Tingkat II Langkat ditujukan untuk peningkatan produksi, yang menciptakan peningkatan pendapatan nelayan dan penyediaan bersumber protein.
2. Kegiatan usaha perikanan dilaksanakan dengan peningkatan usaha perikanan budi daya tambak, perikanan air payau pengembangan, perikanan air tawar dan perikanan laut.
3. Untuk pencapaian tujuan diatas perlu diciptakan kondisi yang menggairahkan kegiatan berusaha dengan peningkatan penyuluhan, pembinaan petani ikan/nelayan. Penyediaan fasilitas perkreditan, perbaikan tata niaga, pemanfaatan UUD serta pengembangan industri perikanan dan penyediaan cold storage.

f). Peternakan.

1. Pengembangan peternakan terutama diusahakan untuk penyediaan konsumsi daerah, penyediaan protein hewani, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan peternak.

2. Peningkatan peternak dilaksanakan dengan peningkatan penyuluhan teknis, penyediaan bibit unggul, perbaikan mutu makanan ternak, serta pencegahan penyakit ternak.

3. INDUSTRI.

- a). Pengembangan sektor industri di Daerah Tingkat II Langkat dimaksudkan menunjang perbaikan struktur ekonomi agar tidak terlalu berat pada sektor pertanian, dalam rangka pencapaian struktur ekonomi yang seimbang dan serasi.
- b). Industri kerajinan yang sudah ada akan terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya.
- c). Menciptakan industri-industri kecil dan menengah yang dapat menyerap tenaga kerja dengan mempergunakan teknologi tepat guna.
- d). Dalam pengembangan industri harus diperhatikan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat yang sesuai dengan pola hidup di daerah.
- e). Pelaksanaan peningkatan industri dilaksanakan dengan pengembangan kecakapan tenaga terampil di bidang teknis administrasi, dan management yang sesuai, baik pembinaan melalui wadah koperasi.
- f). Pengembangan usaha industri ini harus memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup dan tidak memboroskan sumber daya alam.

4. PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

- a). Kebijakan yang ditempuh ialah dengan pengembangan pertambangan bahan galian golongan C yang sudah dimanfaatkan daerah ini khususnya sebagai bahan baku sektor industri.
- b). Pencarian lokasi bahan baku pertambangan yang dapat dimanfaatkan serasa regional maupun Nasional.

5. L I S T R I K.

- a). Melanjutkan usaha-usaha listrik masuk desa, terutama dalam rangka mendorong kegiatan sosial ekonomi desa.
- b). Mengusahakan tenaga-tenaga pembangkit tenaga listrik dan penambahan jaringan sampai ke Kecamatan.

6. PRASARANA PERHUBUNGAN.

- a). Perhubungan Darat.
 1. Perlunasan jaringan jalan serta peningkatan mutu ja-

lan/jembatan terus ditingkatkan terutama jalan penghubungan kepusat-pusat produksi dan lokasi pariwisata, agar hasil-hasil pertanian dapat dipasarkan dengan mudah dan sektor pariwisata dapat berkembang.

2. Melanjutkan pembukaan jalan tembus ke Daerah Tingkat II Karo dalam rangka mengurangi kepadatan lalu lintas di Daerah Tingkat II Medan, dan pemanfaatan potensi disekitar jalan tembus tersebut.

b. Angkutan Sungai Danau dan Ferry.

Penyempurnaan pelayanan sungai-sungai yang banyak terdapat di Daerah Tingkat II Langkat, terutama dalam pelayanan dan pengawasan pelayanan sungai.

c. Perhubungan Laut.

1. Meningkatkan arus perhubungan laut, antar pulau lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
2. Meningkatkan pelabuhan Pangkalan Susu, Pangkalan Berandan sebagai suatu pelabuhan agar dapat dimanfaatkan usaha-usaha pertanian maupun perkebunan dan masyarakat.

d. Pos dan Telekomunikasi.

Melanjutkan penambahan prasarana dan sarana pos mendirikan Kantor Pos Pembantu di Kecamatan-kecamatan.

e. Pariwisata.

1. Di Daerah Tingkat II Langkat tersebut objek-objek pariwisata yang belum dikelola secara baik dan perlu dikembangkan.
2. Mengembangkan usaha-usaha sektor pariwisata terutama dalam menyediakan sarana jalan ke lokasi pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya.
3. Memelihara dan memugar peninggalan-peninggalan sejarah yang ada terdapat di daerah ini.
4. Dalam rangka pengembangan kepariwisata dilaksanakan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kelestarian kebudayaan, adat kesenian, dan suku-suku bangsa yang ada di Daerah Tingkat II Langkat.

7. P E R D A G A N G A N.

- a. Usaha-usaha perdagangan perlu disempurnakan dalam hal penyempurnaan sarana dan prasarana tata niaga seperti susunan jalan, pemasaran, sehingga kestabilan harga terjamin dan tidak terlalu besar perbedaan harga pada sentral-sentral produksi dan pusat pemasaran.

- b. Pembinaan dan peningkatan peranan pengusaha golongan ekonomi lemah.

8. K O P E R A S I.

- a. Koperasi harus ditingkatkan sehingga dapat digunakan dalam pembinaan keuangan golongan ekonomi lemah, sehingga koperasi dapat berfungsi sebagai wadah utama perekonomian rakyat.
- b. Pembinaan koperasi akan dititik beratkan pada peningkatan bidang management, mental, motivasi, serta pengembangan bakat kewiraswastaan dari pada pengurus dan anggota-anggota koperasi.

9. USAHA SWASTA DAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH.

- a. Setiap gerak pembangunan peranan usaha swasta Nasional perlu diikuti sertakan, dan akan ditingkatkan melalui kerja sama yang lebih serasi dengan pemerintah. Perusahaan milik Negara maupun koperasi. Hal ini dilaksanakan dengan menciptakan kondisi yang sehat seperti, penyuluhan prosedur perizinan, ketenteraman berusaha, akan ditingkatkan.
- b. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha, golongan ekonomi lemah, peranan badan pembinaan golongan ekonomi lemah perlu ditingkatkan melalui, penyuluhan dan pengembangan bakat wiraswasta, secara terpadu.
- c. Perlindungan ekonomi lemah terhadap usaha-usaha tradisional akan ditingkatkan.

10. TENAGA KERJA.

- a. Setiap kegiatan pembangunan harus dikaitkan dengan usaha perluasan kesempatan kerja dan pemerataan hasil pembangunan.
- b. Pendidikan dan keterampilan kejuruan perlu dikembangkan untuk mengisi lapangan kerja yang memerlukan keterampilan khusus.

11. TRANSMIGRASI.

- a. Transmigrasi umum tidak memungkinkan lagi di Daerah Tingkat II Langkat.
- b. Penetapan penduduk yang bermukim dilokasi DAS ada yang berkemiringan diatas 40%.
- c. Pembinaan peserta transmigrasi lokal yang ada di Seilapan Kecamatan Babalan sebanyak 500 KK, perlu ditingkatkan.

12. PEMBANGUNAN DAERAH.

- a. Keserasian antar Pembangunan Daerah dengan Pembangunan sektoral yang telah dirintis sejak REPELITA II akan ditingkatkan, sehingga setiap aktivitas pembangunan sektoral yang berlangsung di Daerah Tingkat II Langkat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi Daerah.
- b. Keserasian dan laju pertumbuhan diusahakan melalui pemberian perhatian terhadap daerah-daerah yang terbelakang pertumbuhannya.
- c. Usaha pembangunan Daerah pedesaan dititik beratkan kepada sektor pertanian. Dalam hal ini diperlihatkan kondisi dan kaitannya dengan kegiatan masyarakat desa, sehingga terpadu dengan pembangunan masyarakat desa.

13. SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.

- a. Pemanfaatan sumber alam untuk pembangunan dilaksanakan dengan hemat dan dinikmati sebesar-besarnya oleh Masyarakat, dalam hal ini diketahui sumber-sumber alam yang tersedia.
- b. Setiap pembangunan harus selalu dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dan kelestarian alam.
- c. Rehabilitas terhadap sumber alam, berupa tanah maupun air yang telah rusak akan ditingkatkan secara terpadu.

AGAMA KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN SOSIAL BUDAYA.

1. AGAMA DAN KEPERCAYAAN TUHAN YANG MAHA ESA.

- a. Pembinaan kehidupan dan kerukunan hidup antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan amal bersama-sama membangun masyarakat.
- b. Pembinaan kerukunan hidup sesama umat beragama dilakukan dengan tetap mengakui, mengharapkan dan menghormati kesamaan hak hidup, perkembangan dan penyebaran agama.
- c. Pendidikan dan pengajaran agama terhadap generasi muda diluar pendidikan formal, ditingkatkan melalui lembaga keagamaan berupa pendidikan non formal.
- d. Pembinaan dan bimbingan terhadap masyarakat yang belum beragama ditujukan untuk meningkatkan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tetap menghormati azas kebebasan memilih dan memeluk agama, menurut keyakinan masing-masing.

- e. Meningkatkan pembangunan rumah ibadah dengan swadaya masyarakat dan memberikan perhatian dan kemudahan dalam membangun sarana ibadah.
- f. Meningkatkan pelayanan dan kelancaran ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.

2. P E N D I D I K A N.

- a. Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, Kepribadian serta semangat kebangsaan, agar dapat membangun Bangsa. Oleh karena itu kaitan pendidikan dan pembangunan perlu lebih ditingkatkan.
- b. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila adalah merupakan intra kurikulum dari tanam kanak-kanak sampai keperguruan tinggi. Dalam rangka melaksanakan pendidikan perlu diambil langkah - langkah yang memungkinkan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atas seluruh masyarakat.
- c. Mutu pendidikan akan ditingkatkan melalui methode Pendidikan dan Penataran Guru untuk mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutlak untuk mempercepat pembangunan guna menunjang daya serap murid.
- d. Penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah, karena pendidikan berlangsung seumur hidup.
- e. Pendidikan juga menjangkau program sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, kepramukaan, latihan keterampilan dan pemberantasan buta huruf.
- f. Pendidikan kejuruan yang mempunyai kaitan yang kuat dengan pembangunan akan diperhatikan.
- g. Peningkatan pendidikan Pesanteren Madrasah, selain memperdalam pendidikan keagamaan juga diorientasikan kepada pembangunan.
- h. Pendidikan dan kegiatan olah raga ditingkatkan dan disebar luaskan sebagai suatu cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap orang dalam rangka pembinaan bangsa.
- i. Perguruan swasta di daerah dalam usaha melaksanakan pendidikan Nasional perlu dibina dan dikembangkan pertumbuhannya.
- j. Pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia ditingkatkan dan diperluas sehingga dihayati dan dipergunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

1. Dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan akan terus ditingkatkan penyediaan fasilitas pendidikan untuk mampu menampung anak usia sekolah.

3. KEBUDAYAAN.

- a. Nilai budaya di Daerah ini terus dibina dan dikembangkan guna mempercepat kepribadian bangsa, mempertebal harga diri dan kebanggaan Nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan Nasional.
- b. Tradisi dan peningkatan sejarah yang mempunyai nilai jiwa perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan daerah tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk, memperkaya kebudayaan Nasional.
- c. Pembinaan terhadap kebudayaan kesenian dan adat istiadat yang hidup di daerah ini akan ditingkatkan untuk dapat mempertahankan kelestarian serta dapat memperkaya kebudayaan Nasional.

4. K E S E H A T A N.

- a. Dalam rangka mempertinggi taraf kesehatan dan kecerdasan rakyat di Daerah Tingkat II Langkat mutu gizi diutamakan kepala golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di Desa maupun di Kota, melalui sistem kesehatan Nasional.
- b. Usaha perbaikan kesehatan dilakukan melalui pencegahan penyakit menular dan penyakit dilaksanakan dengan peningkatan sanitasi lingkungan dan perlindungan rakyat terhadap bahaya narkotik.
- c. Peranan Puskemas perlu ditingkatkan sejalan dengan itu penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat terus diperluas serta penyediaan tenaga para medis.

5. KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

- a. Kebijakanaksanaan kependudukan yang perlu ditangani antara lain meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian, terutama kematian anak-anak, perpanjangan harapan hidup, penyebaran penduduk, yang lebih serasi dan seimbang pula, urbanisasi yang lebih berimbang dan merata serta perkembangan penyebaran angkatan kerja.
- b. Program keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga bahagia, dan masyarakat sejahtera dengan pengendalian pertambahan penduduk, sejalan dengan program Nasional, program Keluarga Berencana di Daerah Tingkat II Langkat akan ditingkatkan.

- c. Program Keluarga Berencana tidak terlepas dari penerangan dan penyuluhan kependudukan. Karena itu penyuluhan akan diberikan kepada generasi muda agar mereka menyadari akan arti penting gagasan pembentukan keluarga kecil yang sejahtera.
- d. Pembauran Bangsa akan lebih ditingkatkan disegala bidang kehidupan dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan serta memantapkan ketahanan Nasional.

6. PERUMAHAN DAN AIR MINUM.

- a. Pembangunan perumahan rakyat dan program perbaikan kampung akan dilaksanakan secara terpadu, agar kehidupan masyarakat bertambah baik dan membantu penduduk yang berpendapatan rendah.
- b. Penyuluhan tentang tehnik pembangunan serta pemugaran rumah desa kepada masyarakat akan ditingkatkan, akan masyarakat lebih mengetahui pola rumah yang sehat.
- c. Penyediaan air minum di Kota dan desa akan ditingkatkan untuk kebutuhan konsumsi dan sanitasi lingkungan.

7. KESEJAHTERAAN SOSIAL.

- a. Perbaikan pelayanan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk ikut aktif dalam kegiatan pembangunan.
- b. Usaha kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan pelayanan sosial, bantuan sosial, kegiatan usaha pelayanan sosial adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, karena itu keterlibatan masyarakat perlu dibina terutama kesadaran dan tanggung jawab sosial.
- c. Pemeliharaan orang-orang lanjut usia, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, yatim piatu di Daerah Tingkat II Langkat dilaksanakan kerja sama dengan masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Disamping itu lebih ditingkatkan usaha-usaha agar orang-orang cacat dapat memperoleh kesempatan kerja yang sesuai dengan kemampuannya.

8. GENERASI MUDA.

- a. Sebagian generasi muda perjuangan bangsa dalam pembangunan nasional, pembinaan generasi muda adalah merupakan tugas tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah.
- b. Iklim yang sehat perlu diciptakan agar kreativitas generasi muda berkembang secara wajar dan tanggung jawab

pembinaan generasi mudah harus dimulai sejak masa kanak-kanak agar kepribadian, budi pekerti yang luhur, idealisme/pratiotisme dan daya kreasi tumbuh secara wajar

- c. Untuk tujuan pembinaan generasi muda peranan pendidikan sekolah akan ditingkatkan juga sarana dan prasarana olah raga, kesenian, pramuka akan ditingkatkan.
- d. Wadah pembinaan generasi muda seperti sekolah, pramuka organisasi fungsional pemuda seperti KNPI, organisasi olah raga akan ditingkatkan peranannya.

9. PERANAN WANITA,

- a. Wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan di Daerah Tingkat II Langkat dengan tetap memperhatikan hakekat kewanitaan.
- b. Dalam rangka mendorong partisipasi wanita dalam pembangunan daerah akan makin dikembangkan kegiatan wanita dalam pengembangan kesejahteraan keluarga antara lain melalui organisasi PKK.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAHAN, TERTIB HUKUM, PENERANGAN DAN KPRS.

1. POLITIK.

- a. Pembangunan dan pembinaan politik di Daerah Tingkat II Langkat diarahkan untuk menetapkan perwujudan Demokrasi Pancasila, pelaksanaannya diselaraskan dengan kebijaksanaan Nasional.
- b. Kekuatan Sosial Politik melalui Parpol dan Golkar serta organisasi profesi/fungsional akan lebih dibina agar makin besar peranannya dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Langkat.
- c. Kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan lebih dimantapkan bagi setiap warga negara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha mencapai tujuan nasional. Dalam rangka ini perlu peningkatan komunikasi timbal balik, antara masyarakat dengan lembaga Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah.

2. APARATUR PEMERINTAHAN.

- a. Pemerintahan Desa, baik struktur, administrasi maupun personilnya akan pemerintah Desa mampu menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Karena itu pe-

nyusunan struktur fungsi dan kebudayaan Pemerintah Desa akan diatur lebih sempurna lagi.

- b. Agar perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan program dan proyek yang lebih mantap, maka peningkatan aparatur perencanaan, pembinaan data-data dan fasilitasnya perlu ditingkatkan.

3. H U K U M.

- a. Dalam usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat di daerah dilaksanakan melalui penerangan-penerangan penyuluhan-penyuluhan hukum sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- b. Dalam rangka meningkatkan tertib hukum, kepastian hukum dan bantuan hukum maka kebijaksanaan yang akan ditempuh antara lain adalah menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsinya masing-masing meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.

4. PENERANGAN PERS.

- a. Peranan Penerangan dalam pembangunan terutama adalah guna memasyarakatkan pembangunan itu sendiri. Karena itu akan dikembangkan sistem penerangan yang terpadu dalam komunikasi dua arah. Dengan demikian diharapkan peningkatan kegairahan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan.
- b. Untuk memperluas dan meningkatkan kegiatan penerangan pembangunan keseluruh pelosok daerah, seluruh sarana penerangan seperti radio, TV. Film dan Mass Media lainnya akan ditingkatkan peranannya. Untuk menunjang peranan daerah dalam pembangunan Pemerintah Daerah akan memberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga tercipta suatu pers daerah yang sehat dan bertanggung jawab serta mampu memberikan kontrol yang efektif dan konstruktif.
- c. Pembinaan dan pengembangan pers harus berdasarkan semangat dan jiwa Pancasila agar mampu menunjang pembangunan masyarakat Pancasila.

5. PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

Pembinaan Hankamnas di Daerah Tingkat II Langkat akan mendapat perhatian khusus untuk mencegah timbulnya infiltrasi, subversi dan lain-lain dengan meningkatkan kerja sama dengan penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat.

F. SUMBER PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan Repelita IV Daerah Tingkat II Langkat sumber pembiayaan antara lain adalah :

1. Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui proyek-proyek Pelita Nasional, maupun proyek-proyek Inpres.
2. Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
3. Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Langkat. Anggaran ini harus ditingkatkan terus menerus sebanding dengan proses pertumbuhan ekonomi, baik melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi sumber penghasilan daerah maupun usaha-usaha gotong royong masyarakat atau swadaya masyarakat dan usaha pembiayaan lainnya.

B A B - IV P E N U T U P

A. PELAKSANAAN.

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
2. Tiap Lima Tahun sekali Pola Dasar Pembangunan Daerah ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Daerah dan dengan perkembangan kehidupan Rakyat di Daerah ini.
3. Pelaksanaan Pola Umum Pelita Ke Empat ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Repelita ke Empat Daerah Tingkat II Langkat (1984-1989).
4. Kebijakan pelaksanaan program pembangunan setiap tahun akan dituangkan dalam rencana operasional dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, usul APBN, Inpres dan lain-lain.
5. Dalam melaksanakan pertanggung jawaban keuangan Daerah Bupati Kepala Daerah meningkatkan pengawasan keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

B. PERSYARATAN.

1. Berhasilnya Pembangunan Daerah Tingkat II Langkat sebagai pengalaman Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh la-

pisan masyarakat dan sikap mental, tekad dan semangat ke-
taatan dan disiplin para aparat pembangunan serta seluruh
rakyat.

2. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat
di Kabupaten Langkat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir
dan bathin.
3. Kesejahteraan yang berkeadilan sosial harus menegakkan ke-
tahanan Nasional yang pada gilirannya meratakan jalan bagi
generasi yang akan datang untuk mencapai masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila.

=====oo0oo=====